Globethics Repository

Sikap dan Pemaknaan Perempuan Marginal terhadap Politik Uang

This page was generated automatically upon download from the Globethics Repository. More information on Globethics see https://www.globethics.net. Data and content policy of Globethics Repository see https://repository.globethics.net/pages/policy.

Item Type	Journal volume
Authors	Dewi, Siti Malaiha
Publisher	STAIN Kudus
Rights	With permission of the license/copyright holder
Download date	2026-11-05 13:20:26
Link to Item	http://hdl.handle.net/20.500.12424/153930

ADDIN, Vol. 9, No. 1, Februari 2015

SIKAP DAN PEMAKNAAN PEREMPUAN MARGINAL TERHADAP POLITIK UANG: Studi Kasus Pemilu Tahun 2014 di Kabupaten Kudus

Siti Malaiha Dewi
STAIN Kudus, Jawa Tengah, Indonesia
dewimalaiha@yahoo.com

Abstrak

Fokus tulisan ini adalah sikap dan pemaknaan perempuan marginal terhadap praktik politik uang pada pemilu tahun 2014 di Kabupaten Kudus. Ada tiga sikap perempuan marginal terhadap politik uang. Pertama, bersikap menolak politik uang. Kedua, menerima politik uang dan menjadikan uang sebagai faktor penentu pilihan politiknya. Ketiga, menerima politik uang tetapi tidak mempengaruhi pilihan politiknya. Sikap-sikap tersebut terkait dengan bagaimana perempuan-perempuan tersebut mendefinisikan dan memaknai politik uang itu sendiri. Kelompok pertama memaknai politik uang sebagai suap atau dalam Islam disebut risywah. Risywah di dalam Islam hukumnya haram sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw. bahwa orang yang menyuap dan menerima suap akan masuk neraka. Kelompok kedua dan ketiga yaitu mereka yang menerima politik uang memaknai politik uang sebagai rezeki yang tidak mungkin ditolak. Politik uang juga dimaknai sebagai bagi-bagi uang yang memang harus dikeluarkan oleh seorang calon. Adapun faktor yang melatarbelakangi sikap dan pemaknaan perempuan terhadap politik uang adalah latar belakang agama, latar belakang pendidikan, lingkungan tempat tinggal, independensi/ relasi suami-istri, dan status sosial.

Kata Kunci: Sikap dan Pemaknaan, Perempuan Marginal, Politik Uang.

Abstract

MARGINAL WOMEN'S ATTITUDES AND CONTEMPLATIONS TOWARDS THE MONEY POLITICS: A CASE STUDY OF THE GENERAL ELECTIONS IN 2014 IN KUDUS REGENCY. *The focus of this paper is the attitude and the contemplation of marginal women towards money politic practices in the general election in 2014 in Kudus. There are three marginal women's attitudes towards money politics. First, refuse the money politics. Second, receive the money politics and make money as a political choice determinant. Third, receive the money politics but does not affect their political options. Such attitudes are related to how the women define and interpret the money politics itself. The first group interprets the money politics as a bribe or in Islam called risywah. Risywah is in Islam is haram (forbidden). It was said by the Prophet Muhammad PBUH that people who bribe and accepting a bribe will enter the hell. The second and third groups, they are who receive the money politics define it as the unlikely declined fortune. Money politics is also defined as money dividing that must be issued by a candidate. Some factors which influenced the women's attitude and contemplation towards money politics are religious background, educational background, place of residence, independence/ spouses relationship, and social status.*

Key words: Attitude and Meaning, Marginal Women, Money Politics.

A. Pendahuluan

Transisi Indonesia menuju demokrasi sejak jatuhnya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 dari kekuasaan yang dipegangnya selama lebih dari 30 tahun tidak mungkin dimundurkan. Perubahan Indonesia menuju demokrasi jelas sangat dramatis. Indonesia mengalami liberalisasi politik dan demokratisasi. Bahkan, Indonesia disebut-sebut sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, setelah India dan Amerika Serikat.[1]

Afan Gaffar menyebutkan dua alasan mengapa Indonesia

[1] Azyumardi Azra dalam Tim ICEE UIN Jakarta, *Pendidikan Kewargaan: Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madan*i (Jakarta: Tim ICCE UIN Jakarta, 2008), hlm. ix.

memilih demokrasi sebagai bentuk pemerintahannya. *Pertama*, demokrasi memberi penghargaan yang setinggi-tingginya kepada rakyat. *Kedua*, demokrasi memberikan peluang kepada rakyatnya untuk ambil peran dalam diskursus pembuatan kebijakan publik.[2]

Senada dengan Afan Gaffar, Mahfud MD sebagaimana dikutip oleh Tim ICCE UIN[3] mengatakan bahwa alasan dipilihnya demokrasi oleh sebuah negara karena demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan negara.

Peran masyarakat untuk ambil bagian dalam pemerintahan

[2] Afan Gaffar, *Politik Indonesia Menuju Transisi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005) hlm. viii. Sementara itu, yang dimaksud dengan kebijakan publik sebagaimana ditulis oleh Rosyadi dalam http://www.arrosyadi.wordpress.com adalah sebagai berikut: *The Public Administration Dictionary,* mengatakan bahwa: "*Public Policy is strategic use of reseorces to alleviate national problems or governmental concerns".* Secara sederhana dapat diartikan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah. Adapun Thomas R. Dye (1981) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah "apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan". William N Dunn (1994), mengatakan bahwa kebijakan publik adalah rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain. Adapun Chaizi Nasucha (2004), mengatakan bahwa kebijakan publik adalah kewenangan pemerintah dalam pembuatan suatu kebijakan yang digunakan ke dalam perangkat peraturan hukum. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menyerap dinamika sosial dalam masyarakat, yang akan dijadikan acuan perumusan kebijakan agar tercipta hubungan sosial yang harmonis. Dari beberapa definisi kebijakan publik di atas, dapat dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan: (1) keputusan atau aksi bersama yang dibuat oleh pemilik wewenang (pemerintah); (2) berorientasi pada kepentingan publik dengan dipertimbangkan secara matang terlebih dahulu baik buruknya dampak yang ditimbulkan; (3) untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu; (4) dari hasil diskusi kelas saya menghasilkan "kebijakan publik adalah aksi pemerintah dalam mengatasi masalah dengan memperhatikan untuk siapa, untuk apa, kapan, dan bagaimana?

[3] ICCE UIN Jakarta, *Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani* (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2008), hlm. 108.

diantaranya dalam pemilihan umum (pemilu). di Indonesia, pemilu dilakukan dalam jangka waktu lima tahun sekali. Saat ini Indonesia telah melaksanakan pemilu sebanyak 11 kali, pemilu pertama kali diselenggarakan pada 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, dan yang baru saja terlaksana, yaitu pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden serta wakil presiden pada 2014.

Masing-masing pemilu yang telah dilaksanakan memiliki cerita dan catatan sejarahnya sendiri meskipun banyak juga yang memiliki kesamaanya, seperti Pemilu Tahun 2004, 2009, dan 2014 ini memiliki catatan sejarah tersendiri mengingat pemilu tersebut adalah pemilu yang demokratis dalam sejarah Bangsa Indonesia karena rakyat dapat memilih langsung melalui kertas suara yang memuat photo wakil-wakil mereka yang akan duduk di parlemen berikut presiden dan wakil presiden. Pemilu tersebut juga dikenal dengan pemilu yang paling rumit di dunia karena adanya beberapa tahapan pemilihan yang harus dilakukan yaitu memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota barulah kemudian melakukan pemilihan presiden dan wakil presiden.

Hal yang selalu muncul dan menyertai semua pemilu yang telah terlaksana adalah adanya *money politics* atau politik uang. Politik uang didefinisikan sebagai suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Pembelian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang.

Meski praktik politik uang berseliweran, namun kenyataannya susah sekali menjerat pelakunya, baik dengan pasal pidana maupun perdata. Padahal, dalam Undang-undang, seperti UU Pilkada No. 32 Pasal 117 Tahun 2004 sudah disebutkan bahwa "setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu

sehingga surat suaranya tidak sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp satu juta rupiah (1.000.000)". Politik uang memang ibarat *jaelangkung*, datang tak diundang dan pergi tak pamitan, alias tak kelihatan dan sulit dilacak.[4] Meskipun berbagai lembaga pemantau disebar, pengawas diterjunkan hingga di tingkat desa agar demokrasi berjalan bersih, namun kenyataanya mereka tak mampu membuktikan adanya kecurangan lewat *money politics*.

Kondisi di atas diperparah lagi dengan perilaku masyarakat yang cenderung permisif dan mendukung bahkan ada juga yang menawarkan suaranya untuk dibeli. Bahkan berani mengajukan diri menjadi perantara untuk menjual suara orang lain dalam jumlah besar dengan imbalan yang besar pula. Seperti kutipan wawancara berikut: "Aku ra bakal milih nek rak ono duite, mlaku ki yo gowo bensin. Nek ora ono bensine yo males. Nek wis dadi DPR kan entue luweh akeh".[5] (Saya tidak akan milih kalau tidak ada uangnya. Jalan ya pakai bensin. Kalau jadi DPR mereka dapatnya juga lebih banyak).

Tanpa bermaksud menggenaralisasi sebuah kasus, kutipan di atas menunjukkan kepada kita bahwa pada sebagian masyarakat menjadikan 'uang' sebagai stimulan datang atau tidaknya ke TPS dan 'uang' menjadi penentu dipilih atau tidaknya calon legislatif (caleg) ataupun calon presiden dan wakil presiden. Fakta ini diperkuat dengan frustasi yang dialami oleh sejumlah teman anggota DPR yang juga menjadi caleg dalam pemilu 2014 yang gagal ke kursi dewan karena pada hari H tidak memberikan 'kepyuran'. Padahal selama lima tahun menjadi anggota dewan, selalu melakukan pembinaan, tiap masa reses datang mendengar dan menyelesaikan keluhan masyarakat. Tetapi, hasil akhir lebih ditentukan oleh eksekusi akhir dalam bentuk *money politics* atau sejenis. Apakah seseorang selama lima tahun bolos di parlemen

[4] Rustam Aji, "Menangnya Money Politics", *Radar Kudus*, 20 April 2009.

[5] Perbincangan ibu berinisial KH di Desa Mejobo Kabupaten Kudus 2 April 2014.

atau vokalis tidak ada bedanya di mata pemilih.[6]

Melihat fakta di atas, maka tampak demokrasi memang memunculkan paradoks. Disatu sisi mensyaratkan adanya jaminan kebebasan serta peluang berkompetisi dan berkonflik, namun di sisi lain mensyaratkan adanya keteraturan, kestabilan, dan konsensus 'tahu sama tahu' di antara partai satu dengan yang lain, di antara caleg satu dengan yang lain bahkan di antara pemilih satu dengan pemilih yang lain, termasuk juga pemilih perempuan.

Pemilih perempuan dipilih karena selama ini suaranya jarang didengar padahal di lapangan justru kelompok inilah yang berkontribusi lebih besar pada perolehan suara seorang caleg maupun calon presiden dan wakil presiden. Namun, menulis tentang perempuan bukanlah pekerjaan mudah, apalagi perempuan marginal. Menterjemahkan bahasa mereka saja sudah menjadi kesulitan yang luar biasa, apalagi sampai bisa mengungkapkan pandangan-pandangan politik mereka. Hal ini sangatlah wajar, mengingat, *pertama*, selama ini perempuan jarang dijadikan sumber pengetahuan, *kedua*, perempuan dijauhkan dari politik formal[7]. Kondisi inilah yang justru menjadi tantangan bagi peneliti untuk membuktikan bahwa 'hanya perempuan yang bisa pahami perempuan'.

Marginal disini merujuk definisi yang dibuat oleh Antonio Gramsci sebagai kelompok inferior, yaitu kelompok – kelompok dalam masyarakat yang menjadi subyek hegemoni kelas-kelas

[6] Djoko Susilo, "Dukungan Senilai Sebungkus Rokok", *Jawa Pos*, 13 April 2009.

[7] Politik di sini dilihat sebagai kegiatan *how to exercise the power* yang membatasi lingkup aktivitas seperti *voting* (pemungutan suara), *lobby* (lobi), *campaign* (kampanye), dan lainya yang sejenis. Lebih jelas lihat Ani Widyani Soetjipto, *Politik Perempuan Bukan Gerhana* (Jakarta: Kompas, 2005), hlm.26, bukan politik yang diterjemahkan oleh gerakan feminis radikal sebagai *the personal is political* bahwa setiap kegiatan dimana ada relasi kekuasaan maka itu adalah politik, termasuk relasi dalam wilayah privat. Lebih jelas lihat Ani Rosemarie Putnam Tong, *Feminist Thought: Pengantar Paling Komprehensif kepada Arus Utama Pemikiran Feminis* (Yogyakarta: Jalasutra, 1998), hlm. 67.

yang berkuasa.[8] Adapun yang dimaksud perempuan marginal dalam tulisan ini adalah pengemis perempuan, tukang parkir perempuan, dan buruh rokok perempuan.

Sebenarnya, dalam konteks penelitian ilmu sosial, sejak tahun 1970 di barat telah berkembang penelitian tentang perempuan atau yang disebut dengan riset *"feminist perspective"*. Metodologi penelitian ini berkembang dalam lingkungan akademik di Barat sebagai konsekuensi dari rasa tidak puas, khususnya di kalangan akademisi, terhadap kondisi ilmu pengetahuan yang dinilai bersifat *andosentris*. Dianggap *andosentris* karena ilmu pengetahuan pada umumnya menyusun konsep atau teori dengan cara mengasumsikan perempuan sebagai obyek pasif, membuat perempuan *"tidak kelihatan",* atau malah menjadi *"misogyny"* (sikap tidak menyukai perempuan). Ciri lain yang menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan bersifat *andosentris* adalah adanya kebiasaan mengadakan *"overgeneralization"* dengan membuat pernyataan yang berlaku bagi kedua jenis kelamin, sekalipun studi yang dibahas hanya satu kelompok jenis kelamin tetapi hasilnya diberlakukan bagi keduanya.[9] Dengan metode penelitian berperspektif perempuan bias-bias tersebut berusaha diminimalkan, sehingga terjadi keseimbangan antara laki-laki dan perempuan dan tidak *sexist.*[10]

Posisi perempuan dalam penelitian berperspektif perempuan tidak hanya sekedar diteliti atau sekedar sebagai obyek akademisi saja, bukan pula hanya untuk kepentingan pembuat kebijakan, atau untuk membagi kepedulian kepada masyarakat tentang nasib perempuan. Tetapi lebih dari itu, penelitian berperspektif perempuan harus memberi manfaat dan bermaksud untuk membantu memperbaiki nasib perempuan,

[8] http://www.kunci.or.id/esai/misc/antariksa-subaltern.htm.

[9] M. Eicher, *Nonsexist Research Methods: a Practical Guide* (London: Allen & Unwin, Inc., 1991), dikutip oleh Tri Marhaeni dalam *Jurnal Studi Gender Palastren*, Volume 2, Nomor 1, Juli 2009, hlm. 3.

[10] R. Saptari dan B. Holzner, *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997), dikutip oleh Tri Marhaenidalam *Jurnal Studi Gender Palastren*, Volume 2, Nomor 1, Juli 2009, hlm. 3.

terutama yang disebabkan karena hubungan gender yang timpang. Kalau sekedar menempelkan kata *'perempuan atau wanita'*, sebenarnya kita baru bicara *'tentang perempuan'* karena implikasi dari semua itu tidak secara langsung dirasakan oleh perempuan. Perempuan hanya menjadi obyek. Akan tetapi ketika semua hal tersebut berimplikasi langsung kepada perempuan, menyentuh kehidupan perempuan, terlebih *'mendengar suara perempuan'*, dan mengakomodir aspirasi perempuan, maka kita sebenarnya sedang berbicara *'sesuatu untuk perempuan'*. Jadi, Penelitian dan penulisan berperspektif perempuan sebenarnya adalah penelitian yang tidak hanya menganggap bahwa yang layak diteliti dan ilmiah hanyalah laki-laki, akan tetapi perempuan juga layak untuk diteliti dan menjadi sumber ilmu pengetahuan.[11]

Berdasarkan latar belakang di atas, maka menarik untuk dilihat bagaimana perempuan memaknai, dan mensikapi fenomena politik uang, serta faktor – faktor yang melatarbelakangi diterima atau tidaknya politik uang, baik pada pemilu legislatif maupun pemilihan presiden dan wakil presiden Tahun 2014 yang lalu.

B. Pembahasan

1. Sikap: Arti dan Teori

Untuk membaca sikap perempuan terhadap politik uang maka terlebih dahulu diuraikan dulu mengenai definisi sikap itu sendiri. Menurut Drs. Saifuddin Azwar, MA, sebetulnya ada lebih dari tiga puluh macam definisi sikap ang dikemukakan oleh ahli. Dari kesemuanya itu, dapat dikelompokkan menjadi tiga kerangka pemikiran. *Pertama*, kerangka pemikiran yang diwakili Louis Thurstone yang mendefinisikan sikap sebagai suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan. Sikap seseorang terhadap objek adalah perasaan mendukung atau memihak ataupun perasaan tidak mendukung terhadap suatu objek. Kelompok *kedua*, seperti yang diungkapkan oleh Allport, sikap merupakan kecenderungan potensial untuk bereaksi apabila individu dihadapkan pada suatu stimulus yang menghendaki adanya respon. Sedangkan kelompok

[11] *Ibid.*, hlm. 4.

ketiga, mendefinisikan sikap sebagai suatu konstelasi komponen kognitif , afektif, dan konatif yang berinteraksi dalam memahami, merasakan, dan berperilaku terhadap suatu obyek.[12]

Dari ketiga definisi di atas, dapat dikatakan bahwa sikap sikap hanya akan ada artinya bila ditampakkan dalam bentuk pernyataan perilaku baik lisan maupun perilaku perbuatan. Bentuk pernyataan seseorang sangat tidak pasti dan sangat tergantung pada kondisi serta situasi dimana dan pada waktu apa individu tersebut berada. Apabila individu berada pada situasi yang betul-betul bebas dari berbagai bentuk tekanan atau hambatan yang dapat mengganggu ekspresi sikapnya, maka dapat diharapkan bahwa bentuk-bentuk perilaku yang ditampakkanya akan merupakan ekpresi sikap sebenarnya.[13] Maka untuk mendapatkan sikap yang sesungguhnya dari perempuan yang menjadi informan terhadap politik uang, maka digunakanlah situasi yang santai seperti pada saat pengajian ibu-ibu, dengan melempar topik pembicaraan tentang politik uang.

Sikap juga bersifat dinamis dan terbuka terhadap kemungkinan perubahan dikarenakan interaksi seseorang dengan lingkungan di sekitarnya. Namun, karakteristik sikap pasti ada. Hal ini ditunjukan dengan arah, intensitas, konsistensi, dan spontanitasnya. Suatu sikap mempunyai arah artinya sikap menunjukkan apakah seseorang menyetujui atau tidak menyetujui, apakah mendukung atau tidak mendukung, apakah memihak atau tidak memihak terhadap suatu obyek sikap. Seseorang yang mempunyai sikap mendukung terhadap suatu obyek sikap berarti mempunyai sikap yang berarah positif terhadap obyek tersebut, seseorang yang tidak memihak atau tidak mendukung sesuatu obyek sikap berarti mempunyai sikap yang arahnya negatif.[14]

Sikap terbentuk dari interaksi sosial yang oleh individu. Interaksi sosial mengandung arti lebih daripada sekedar adanya

[12] Saifuddin Azwar, *Sikap Manusia Teori dan Pengukuranya* (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 3.

[13] *Ibid.*, hlm. 5.

[14] *Ibid.*, hlm. 10.

kontak sosial dan hubungan antar individu. Dalam interaksi sosial, terjadi hubungan saling mempengaruhi di antara individu satu dengan yang lain, individu dengan lingkungan fisik maupun psikologis di sekelilingnya. Di antara berbagai faktor yang memengaruhi pembentukan sikap adalah sebagai berikut.[15]

a. Pengalaman pribadi

Sikap timbul dari pengalaman dan merupakan hasil belajar individu. Karena apa yang telah atau sedang dialami seseorang akan ikut membentuk tanggapan dan mempengaruhi penghayatan terhadap objek sikap, dan tanggapan tersebut akan menjadi salah satu dasar terbentuknya sikap.

b. Pengaruh orang lain yang dianggap penting

Orang lain di sekitar kita adalah salah satu komponen penting yang dapat mempengaruhi sikap kita. Orang lain tersebut antara lain orang yang kita harapkan persetujuannya, orang yang tidak ingin kita kecewakan, atau orang orang yang berarti khusus bagi kita. Di antara orang yang dianggap penting bagi diri individu adalah orang tua, orang yang status sosialnya lebih tinggi, teman sebaya, teman dekat, guru, teman kerja, istri atau suami.

Pada umumnya, individu cenderung untuk memiliki sikap yang komformis atau searah dengan sikap orang yang dianggap penting. Kecenderungan ini antara lain dimotivasi oleh keinginan untuk berafiliasi dan keinginan untuk menghindari konflik dengan orang yang dianggap penting tersebut. Pada masa anak-anak dan remaja, orang tua biasanya menjadi figur yang paling berarti bagi anak. Namun, biasanya apabila dibandingkan dengan pengaruh teman sebaya maka pengaruh sikap orang tua jarang menang. Bahkan ketidaksesuaian pendapat dengan orang tua biasanya dianggap sebagai bentuk independensi yang bisa dibanggakan.

Hubungan atasan-bawahan juga menjadi pengaruh sikap seseorang. Sudah menjadi umum, sikap atasan terhadap suatu

[15] *Ibid.*, hlm. 24.

masalah diterima dan dianut oleh bawahan tanpa landasan afektif maupun kognitif yang relevan dengan obyek sikap seseorang. Kesamaan sikap didasari oleh kepercayaan yang mendalam kepada atasan atau oleh pengalaman bahwa atasan selalu dapat berpendapat atau bersikap yang tepat dalam segala situasi di masa lalu. Apabila terjadi kebimbangan dalam bersikap maka biasanya peniruan sikap atasan merupakan jalan yang dianggap terbaik. Kadang-kadang peniruan sikap atasan itu terjadi tanpa disadari oleh individu dan dibentuk oleh karisma atau oleh otoritas atasan.

c. Pengaruh kebudayaan

Kebudayaan di mana kita hidup dan dibesarkan akan mempunyai pengaruh besar terhadap pembentukan sikap. Kebudayaan menanamkan garis pengarah sikap seseorang terhadap berbagai masalah dan kebudayaan pula yang telah mewarnai sikap masyarakat, karena kebudayaan telah memberi corak pengalaman individu-individu yang menjadi anggota kelompok masyarakat.

d. Media massa

Meskipun pengaruh media massa tidaklah sebesar pengaruh interaksi individual namun dalam proses pembentukan sikap dan perubahannya, peranan media massa tidak kecil artinya. Dengan adanya informasi baru yang disampaikan oleh media massa mengenai suatu hal dapat memberikan landasan kognitif baru bagi terbentuknya sikap mengenai hal tersebut. Pesan-pesan sugestif yang dibawa oleh informasi tersebut, bila cukup kuat akan memberi dasar efektif dalam menilai sesuatu hal sehingga terbentuklah arah sikap tertentu.

e. Pengaruh emosional

Terkadang suatu bentuk sikap merupakan pernyataan yang didasari oleh emosi yang berfungsi sebagai semacam penyaluran frustasi atau pengalihan bentuk mekanisme pertahanan ego. Sikap yang demikian dapat merupakan sikap yang sementara dan segera berlalu begitu frustasi telah hilang.

Contoh bentuk sikap yang didasari emosi adalah prasangka. Prasangka merupakan bentuk sikap negatif yang didasari oleh kelainan kepribadian pada orang yang frustasi.

f. Lembaga pendidikan dan lembaga agama

Lembaga pendidikan dan lembaga agama merupakan suatu sistem yang mempunyai pengaruh dalam pembentukan sikap dikarenakan keduanya meletakkan dasar pengertian dan konsep moral dalam diri individu. Dalam hal ini ajaran yang diperoleh dalam lembaga pendidikan dan lembaga agama seringkali menjadi determinan tunggal yang menentukan sikap.

Terdapat beberapa teori tentang sikap antara lain adalah teori keseimbangan (*balance theory*) oleh Heyder. Inti teori keseimbangan adalah bahwa suatu efek negatif terhadap orang lain cenderung akan berada dalam keadaan seimbang dengan afek seseorang terhadap suatu obyek sikap dimana orang lain itu juga mengarahkanya; teori kesesuaian (*congruity priciple*) dari Tannenbaum; teori disonansi kognitif (*cognitive dissonance*) yang dikemukakan oleh Festinger maupun teori afektif-kognitif dari Rossenberg, serta beberapa teori lain. Di samping teori-teori tersebut, kemudian dikembangkanlah *Theory of reasoned action* yang relatif baru yang dikemukakan oleh Ajzen dan Fishbein. Teori ini lebih menekankan pada proses kognitif serta menganggap bahwa manusia adalah makhluk dengan daya nalar dalam memutuskan perilaku apa yang akan diambilnya, yang secara sistematis memanfaatkan informasi yang tersedia di sekitarnya.[16] Teori-teori tersebut akan digunakan sebagai *guide* selama penelitian ini berlangsung.

2. Politik Uang

Definisi tentang politik uang memang sangat kabur**.** Masing-masing pihak mendefinisikan politik uang menurut versi mereka sendiri-sendiri. Sebagai contoh adalah definisi politik uang, dalam pandangan parpol, yakni suatu cara yang dengan sangat pragmatis

[16] *Ibid.,* hlm. 33.

mempengaruhi seseorang dengan uang, sehingga orang tersebut memilih calon anggota legislatif (caleg) atau partai tertentu pada pemilu; Atau, memberikan uang pada seseorang disertai janji-janji agar mendukung caleg atau parpol tertentu. Jadi, jika seorang peserta kampanye memberikan bantuan ke rumah ibadah pada masa kampanye, tidak bisa dikategorikan sebagai politik uang, kalau peserta kampanye itu memang senang membantu rumah ibadah dan kebetulan dia sedang ibadah bersama umat pada masa kampanye, sulit mengategorikan sumbangan itu sebagai politik uang.[17]

Sebetulnya, aturan tentang pelarangan politik uang sudah diatur jelas baik dalam UU No 32/2004 Pasal 82 Ayat (1) yang menyebutkan, Pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih. Kemudian Ayat (2), Pasangan calon dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh DPRD; maupun dalam Undang-undang Nomor 10/2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Pasal 274 yang menyebutkan bahwa pelaksana kampanye yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung atau pun tidak langsung agar tidak menggunakan haknya untuk memilih, atau memilih peserta pemilu tertentu atau menggunakan haknya untuk memilih dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama 24 bulan; Pasal 218 pada UU 10/2008 itu dengan jelas dipaparkan penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD dan DPRD dapat dilakukan bila caleg itu terbukti melakukan tindak pidana pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; serta peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD

[17] *Suara Pembaharuan*, Minggu 14 Desember 2008.

dan DPRD. Namun, kenyataanya, politik uang dilakukan sejak calon mendaftarkan diri ke partai politik sampai masa kampanye, dalam bentuk bantuan untuk rumah ibadah, bingkisan lebaran, natal dan tahun baru, pemberian sembako untuk korban banjir, *door prize*, atau biaya transportasi warga ke tempat kampanye, yang menurut partai politik tidak bisa dikategorikan sebagai politik uang. Memang, definisi tersebut sulit diaplikasikan, karena banyak tafsir atas pasal tersebut. Contohnya, dalam undang-undang tidak dipaparkan definisi "materi lainnya". Begitu pula pada peraturan KPU tentang kampanye tidak menjabarkan makna "materi lainnya" itu.

B. Herry Priyono menjelaskan istilah politik uang digunakan setidaknya pada dua gejala.[18] *Pertama,* istilah itu menunjuk fakta tentang kekuatan uang dalam perebutan kekuasaan. *Kedua*, istilah *money politics* menunjuk gejala pembusukan yang dibawa oleh kuasa uang dalam menentukan proses pencalonan, kampanye, dan hasil pemilu para anggota legislatif ataupun presiden.

Analisa Herry tentang politik uang mengindikasikan adanya campur tangan uang dalam proses demokrasi. Uang menjadi instrumen penting dalam suksesi pencalonan pemimpin. Untuk meraup suara, misalnya, uang adalah senjata utama yang diandalkan. Maka, wajar jika muncul pola pengintegrasian uang dalam politik atau yang biasa kita kenal dengan *money politics*.

Dalam Islam isu tentang politik uang telah mendorong umat Islam mengkaji melalui kaidah-kaidah agama. Ketua MUI Kudus KH. Syafiq Naschan pada salah satu seminar tentang pemilu mengatakan bahwa politik uang dapat menghambat terwujudnya demokrasi yang adil dan jujur.[19]

Kajian Islam menunjukkan politik uang adalah termasuk suap (*risywah*). Suap diharamkan di dalam Islam. Nabi bersabda bahwa orang yang menyuap dan menerima suap akan masuk

[18] B Herry Priyono, "Dari 'Money Politics' ke 'Chremocracy"', *Media Indonesia.*

[19] Seminar Regional "Memangkas Korupsi dan Money Politic dalam Pemilu 2009", di Aula DPRD Kudus, Jawa Tengah, Selasa, 24 Maret 2009.

neraka.[20] Menurut keterangan KH. Syafiq Naschan indikator suap dalam hal ini politik uang adalah adanya penekanan tertentu ketika memberikan suatu barang. Dengan kata lain, disimpulkan bahwa orang memberi untuk memperoleh imbalan yang melanggar syariat.

Barang yang diberikan tidak hanya berupa uang, tetapi dapat berbentuk barang kebutuhan sehari-hari, seperti beras, gula, minyak goreng, bahkan pulsa. Sehingga konsepsi politik uang tidak melulu mengasumsikan uang sebagai alat untuk membelokkan hari nurani konstituen, tetapi bisa juga berupa barang lain yang sesuai dengan kebutuhan konstituen.

Jika dikaitkan dengan kajian kepemimpinan Islam, politik uang dapat menghalangi terselenggaranya pemilihan pemimpin yang sesuai dengan ajaran Islam, yakni terpilihnya pemimpin yang jujur, adil, *tabligh*, dan *fatonah*.[21] Maka, di sini politik uang mampu membelokkan niat konstituen untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan Islam, sehingga melenceng memilih pemimpin yang bobrok moralnya, karena disuap.

Jika terjadi hal demikian, maka wajar apabila terwacanakan pengharaman politik uang. Karena politik uang menjadi musuh dari demokrasi yang bersih, jujur, dan adil. Dan di dalam Islam sendiri politik uang menjelma menjadi virus mematikan dalam sistem pemilihan pemimpin yang sesuai dengan konsep Islam.

3. Memahami Bahasa Perempuan

Apakah perempuan dan laki-laki memang berbahasa secara berbeda? Itulah pertanyaan dalam bidang sosiolinguistik yang menarik pakar ilmu bahasa sampai sekarang. Ada pandangan yang mengemukakan bahwa perempuan dan laki-laki berbahasa secara berbeda. Sebaliknya ada juga pandangan yang tidak setuju dengan jawaban tersebut. Berikut ini dikemukakan tiga teori yang mencoba memberikan penjelasan tentang pertanyaan di atas,

[20] Dalam lafal bahasa Arab berbunyi, "*Arrasyi wal murtasyi finnar*".

[21] Wawancara dengan Ketua MUI Kudus, K.H. Syafiq Naschan, 3 Februari 2014.

yakni:[22]

a. Teori dominasi

Satu penjelasan yang ditawarkan oleh teori dominasi terhadap perbedaan bahasa perempuan dan laki-laki adalah berkenaan dengan kekuasaan (power). Perbedaan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan adalah penyebab utama variasi wacana yang dihasilkan.

b. Teori perbedaan

Menurut teori ini, perempuan dan laki-laki mengembangkan gaya –gaya berbicara / bertutur yang berbeda, mereka secara sistemik terpisah dalam tahap-tahap penting kehidupan mereka. Perempuan dikatakan lebih sering dan cenderung menggunakan gaya tutur kooperatif, sebaliknya laki-laki lebih cenderung menggunakan gaya kompetitif. Pembedaan secara gender tersebut berperan secara signifikan terhadap marginalisasi perempuan tidak hanya pada wilayah publik tetapi juga pada wilayah domestik. Laki-laki menjadi makhluk yang dominan terhadap perempuan.

c. Analisa gender

Menurut teori ini, perbedaan umur, kebangsaan, religi, kelas, orientasi seksual, latar belakang regional dan kultural membuat dua orang perempuan mempunyai pandangan yang berbeda. Dengan demikian setiap individu perempuan memiliki pandangan yang juga tidak selalu sama terhadap berbagai persoalan.

Dalam konteks Indonesia, pemahaman terhadap perempuan Indonesia juga mengalami hal yang sama. Cara pikir masih didominasi oleh laki-laki. Akibatnya, cara pandang yang terjadi masih belum komprehensif dan menciptakan ketimpangan antargender. Yang masih kurang dilakukan dalam memahami perempuan adalah memahami perempuan dari teks-teks yang dihasilkanya. Jika kita setuju dengan sebuah klaim bahwa "bahasa

[22]Anang Santoso*, Bahasa Perempuan Sebuah Potret Ideologi Perjuangan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 33.

merupakan pedoman menuju realitas sosial", maka memahami bahasa yang dihasilkan perempuan akan semakin memahami realitas yang bernama perempuan. Dari pilihan bahasa dapat diketahui konstruk ideologi yang diperjuangkan.

Bicara tentang konstruks tentu kita ingat pada Berger dan Luckmann dalam bukunya *The Social Constuction of Reality* yang menyatakan bahwa manusia dan masyarakat adalah produk yang dialektis, dinamis, dan plural secara terus menerus. Proses dialektis mempunyai tiga tahapan. *Pertama*, eksternalisasi, yakni usaha ekspresi diri manusia ke dalam dunia, baik dalam kegiatan mental maupun fisik. Sesuai dengan kodratnya manusia akan selalu mencurahkan diri dimanapun ia berada. *Kedua*, obyektivikasi, yakni hasil yang telah dicapai, baik mental maupun fisik dari tahapan eksternalisasi manusia. *Ketiga,* internalisasi, yakni proses penyerapan kembali dunia objektif ke dalam kesadaran sehingga subjektif individu dipengaruhi oleh struktur dunia sosial. Dalam praksisnya ideologi mendapatkan tempat artikulasi yang sangat jelas dalam bahasa. Struktur linguistik dimanfaatkan, didayagunakan, difungsikan untuk mengemukakan ideologi secara sadar, tidak sadar, bahkan bawah sadar. [23]

4. Sikap dan Pemaknaan Perempuan terhadap Politik Uang

Uang bisa dianalogikan dengan Tuhan, demikian ungkapan George Simmel (1858 – 1918).[24] Esensi tentang Tuhan adalah keanekaragaman dan kontradiksi yang ada di dunia ini pada akhirnya akan mencapai kesatuan di dalam-Nya. Begitu pula uang. Sebabnya adalah uang menjadi ekspresi yang setara dan padanan bagi seluruh nilai yang bersifat absolut. Semua yang bertentangan, paling berjarak, mendapatkan sebutan sama dan saling menjalin kontak dalam kekuatan sentral: Uang![25]

[23] *Ibid.*, hlm. 44.

[24] George Ritzer, *Teori Sosiologi Modern* (Yogyakarta: Bentang), hlm. 20.

[25] Triyono Lukmantoro, "Demokrasi dalam Rezim Uang", *Jawa Pos*, 21 Maret 2009.

Mungkin saja pemikiran George Simmel mengenai uang di atas terlalu hiperbolis. Tapi, gagasan Simmel itu membenarkan perjalanan demokrasi yang terjadi di negeri ini. Demokrasi berubah sebagai pasar yang riuh dengan transaksi penjual-pembeli. Elite politik adalah agen yang membeli suara rakyat. Sementara itu, sebagian rakyat adalah pihak yang dengan sengaja menjual suaranya, meskipun banyak juga rakyat yang tak berdaya yang menjual aspirasinya. Itulah yang terjadi pada kontestasi bernama pemilihan umum Tahun 2014.

Fenomena itu menunjukkan rezim monotesi telah mendominasi praktik demokrasi. Hubungan elite-rakyat ditentukan berapa nilai uang yang mampu dikantongi. Interaksi politik yang terjadi makin intensif pada pemilu karena ada relasi pertukaran seperti rakyat menjual dan elite membelinya. Akhirnya, panggung yang ditampilkan adalah siapa yang mampu membeli, maka dialah yang berkuasa. Dalam rumusan yang lebih transparan, demokrasi yang dikontrol rezim uang hanya menyediakan dorongan "aku membayar, maka aku ada". Maka tidak aneh jika korupsi menjadi ritual harian. Ketelanjangan yang memalukan ditanggung secara bersama-sama, dan kevulgaran pidana akhirnya bisa dipermaklumkan. Sama halnya ketika rakyat, akibat terhimpit kemiskinan, lebih peduli dengan berapa banyak uang yang hendak diberikan elite politik ketimbang nasib suara mereka, maka pemilu telah mengalami disorientasi yang sistematis.

Menjadi tepat pernyataan Simmel bahwa uang merupakan instrumen yang bisa memasuki hampir seluruh interaksi sosial. Interaksi politik makin intensif pada pemilu karena didalamnya berlangsung relasi pertukaran seperti rakyat menjual suara dan elite politik membelinya. Dalam relasi seperti itu, uang tidak lagi menjadi sarana melainkan tujuan itu sendiri. Uang memiliki kekuatan sebagai sarana yang tidak terbatas, sehingga kuantitas uang menjadi kualitas yang signifikan.

Bagaimana pandangan dan sikap perempuan terhadap politik uang pada pemilu legislatif maupun pemilu presiden beserta wakilnya serta faktor-faktor yang mempengaruhi

pembentukan sikap tersebut. Adapun yang dimaksud dengan sikap adalah perasaan mendukung atau memihak ataupun perasaan tidak mendukung terhadap suatu objek. Jadi yang dimaksud dengan sikap dalam penelitian ini adalah perasaan mendukung atau memihak ataupun perasaan tidak mendukung perempuan terhadap politik uang.

Sikap dan pemaknaan perempuan terhadap politik uang dapat dibedakan menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama, bersikap menolak politik uang; Kelompok kedua, menerima politik uang dan menjadikan uang sebagai faktor penentu pilihan politiknya; Kelompok ketiga, menerima politik uang tetapi tidak mempengaruhi pilihan politiknya.

Kelompok pertama dapat dilihat dari data perempuan kepala keluarga, ibu rumah tangga, dan perempuan guru madrasah. Kelompok kedua dapat dilihat dari data perempuan buruh rokok, perempuan penanak nasi, dan pengemis perempuan. Sedangkan kelompok ketiga dapat dilihat dari data perempuan pembuat kue, perempuan buruh tani, seorang bidan, dan tukang parkir perempuan.

Sikap-sikap di atas terkait dengan bagaimana perempuan-perempuan tersebut mendefinisikan dan memaknai politik uang itu sendiri. Kenapa perempuan kepala keluarga, ibu rumah tangga, dan perempuan guru madrasah menolak politik uang salah satu sebabnya adalah adanya pemahaman yang hampir sama bahwa politik uang sama dengan suap atau dalam Islam disebut *risywah*. Risywah di dalam Islam hukumnya haram sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW bahwa orang yang menyuap dan menerima suap akan masuk neraka.[26]

Jika dikaitkan dengan kajian kepemimpinan Islam, politik uang dapat menghalangi terselenggaranya pemilihan pemimpin yang sesuai dengan ajaran Islam, yakni terpilihnya pemimpin yang jujur, adil, *tabligh*, dan *fatonah*.[27] Maka, di sini politik uang

[26] Dalam lafal bahasa Arab berbunyi, "*Arrasyi wal murtasyi finnar*".

[27] Wawancara dengan Ketua MUI Kudus, K.H. Syafiq Naschan, 3 Februari 2014.

mampu membelokkan niat konstituen untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan Islam, sehingga melenceng memilih pemimpin yang bobrok moralnya, karena disuap. Ibu Rn (ibu rumah tangga) bahkan mengatakan bahwa calon pemimpin yang melakukan pembagian uang menandakan pemimpin tersebut tidak bersih dan otomatis dia tidak akan memilihnya. Lebih lanjut dia mengatakan bahwa orang yang memilih karena uang berarti orang yang bodoh. Ibu As (Perempuan Kepala Keluarga) menambahkan bahwa suap menyuap hanya akan merusak citra demokrasi. Ibu SM (guru) berpendapat rusaknya demokrasi diawali oleh elite politik sendiri. Dia mengatakan bahwa:

> ''Politik uang itu bentuk keserakahan politisi elit yang sekarang berkuasa, atau yang ingin merebut kekuasaan. Politik uang itu kan yang mengawali politisi, untuk meraih simpati rakyat dengan jalan pintas. Cara-cara seperti itu tidaklah etis karena mengajarkan kepada rakyat untuk bersikap pragmatis. Masyarakat lama-kelamaan akan selalu tergoda dengan hal-hal yang sifatnya cepat dalam memperoleh uang. Sekarang, kompetisi uang sangat mengerikan. Pemilu 2014 ini, saya kira menjadi cermin betapa aspirasi rakyat kecil sangat murah, karena dapat dibeli dengan uang cash. Karena sudah merasa membeli, ya politisi dengan enaknya bilang bahwa dia bisa berbuat apa saja menurut kepentingannya, karena sudah membayar keinginan rakyat lewat uang yang dibagikan. Ini saya dengar dari suami saya yang ngobrol dengan beberapa anggota dewan. Memang ada kecenderungan lingkaran sistem yang sangat tidak sehat. Politisi tak pernah mau mengerti aspirasi rakyat, mereka hanya ingin berkuasa lewat jalan pintas dengan biaya minimal. Kalau sudah begini, Indonesia mau diapain? Sebetulnya, politik uang itu tak sepenuhnya diinginkan oleh rakyat. Tetapi banyak tokoh politik yang justru melanggengkan praktik politik uang, dengan ucapan yang membingungkan. Misalnya ada ungkapan, ''ambil saja uangnya, tapi jangan pilih orangnya, pilih saja yang anda suka'', atau ungkapan, ''terserah siapa yang kasih uang, tapi pilihlah yang dekat dengan anda'',

> ini saya kira ungkapan yang menjerumuskan alur pikiran rakyat kecil pada hal yang keliru. Kalau sudah begini, politik uang terkesan dilanggengkan. Ini yang membuat saya prihatin. Ikatan antara pemilih dan yang dipilih bukan lagi soal ideologis tetapi sekedar ikatan uang. ''anda membeli saya menjual''.[28]

Selain karena faktor pemahaman agama yang menjadi faktor determinan perempuan di atas menolak politik uang ada faktor lain yang bisa kita lihat cukup signifikan mempengaruhi penolakan tersebut, yaitu latar belakang pendidikan, lingkungan, independensi, dan status sosial mereka. Dilihat dari latar belakangnya mereka adalah sarjana, kecuali ibu Rn yang lulus SMA, tetapi ibu Rn ini hidup di lingkungan perkotaan yang identik dengan masyarakat yang rasionalitasnya tinggi sehingga meskipun Ibu Rn seorang ibu rumah tangga tetapi terlihat sekali independensinya dan keteguhanya dalam memegang prinsip. Terbukti bahwa berkali-kali mengikuti pemilu jika tidak ada calon yang *sreg* maka dia hanya datang ke TPS, tetapi tidak akan memilih. Dan keputusan tersebut tidak dipengaruhi oleh suaminya, tetapi dilakukan dengan kesadaran dia sendiri.

Status sosial juga mempengaruhi cara pandang seseorang terhadap politik uang. Status adalah *"A position or a place within a set of relationship among people"* atau posisi seseorang dalam hubunganya dengan orang lain. Posisi ini sangat menentukan peran seseorang, karena peran adalah *the behavior generally expected of one who occupies a particular status*.[29] Dan, status ibu As sebagai panitia pemilihan umum maupun Ibu SM sebagai guru juga sangat mempengaruhi sikap dan peran mereka dalam hal penolakan politik uang. Tidak mungkin seorang guru yang mengajarkan tentang pentingnya berperilaku jujur justru tidak jujur, dan tidak mungkin seorang panitia pemilu yang mensosialisasikan pelaksanaan pemilu yang

[28] Hasil wawancara dengan SM.

[29] Ritzer G. Kammeyer, Kenneth C.W., dan Norman R. Yetman, *Sociology Experiencing a Change Society* (Massachusetts: Allyn and Bacon, Inc., 1987), hlm. 80.

jujur justru mengebiri kejujuran itu sendiri. Jadi status sosial mempengaruhi cara pandang dan sikap sesorang terhadap obyek tertentu.

Kelompok kedua yaitu mereka yang menerima politik uang memaknai politik uang sebagai rejeki yang tidak mungkin ditolak. Politik uang juga dimaknai sebagai bagi-bagi uang yang memang harus dikeluarkan oleh seorang calon. Kelompok ini berpikir sangat praktis. Kiranya ungkapan "Ada uang maka timbul sayang", cukup tepat menggambarkan cara pandang mereka. Bagi mereka siapa yang memberi uang atau sejenisnya maka akan menjadi pilihan politik mereka meskipun calon tersebut tidak dikenal. Cara pandang seperti ini disebabkan oleh kondisi hidup mereka yang memang pas-pasan seperti perempuan penanak nasi, perempuan buruh rokok dan pengemis perempuan. Bagi mereka, pemilu tidak akan berdampak langsung terhadap diri mereka, mereka harus tetap kerja kalau ingin makan, dan ketika ada uang yang dibagi-bagikan, maka itu dianggap sebagai dampak langsung pemilu.

C. Simpulan

Mendengar suara perempuan adalah hal yang wajib ketika akan menuju sebuah perubahan karena perempuan selain secara kuantitas lebih banyak dari laki-laki, ternyata suara perempuan sungguh luar biasa kalau didengar. Untuk itu, berbagai pihak yang telibat dalam penciptaan demokrasi yang jujur dan adil di negeri ini, hendaknya juga mendengar definisi, pemahaman, dan sikap perempuan terhadap politik uang, sebab apapun strategi yang digunakan untuk memberantas politik uang akan sia-sia jika tidak berbasis pada pendapat masyarakat secara seimbang antara laki-laki dan perempuan. Slogan, spanduk yang ada di kecamatan dan balai desa yang bertuliskan "JAUHI POLITIK UANG!!! LAPOR KE PANWAS TERDEKAT" hanya akan menjadi slogan semata. Semoga bisa.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulah, Irwan, *Sangkan Paran Gender*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Arivia, Gadis, *Filsafat Berperspektif Feminis,* Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2003.

Arif, Saiful, dkk., *Demokrasi: Sejarah, Praktik dan Dinamika Pemikiran*, Malang: Averrous Press, 2006.

Bhasin, Kamla, *Menggugat Patriarki: Pengantar Tentang Persoalan Dominasi terhadap Kaum Perempuan*, Jakarta: Yayasan Bentang Budaya dan Kalyanamitra, 1996.

Fakih, Mansour, "Pengantar", dalam Julia Cleves Mosse, *Gender & Pembangunan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Gaffar, Afan, *Politik Indonesia Menuju Transisi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

ICCE UIN Jakarta, *Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2008.

Nugroho, Kukuh B. dan Elza P. Taher, *Buku Pendidikan Pemilu 2004 untuk Pemilih Pemula*, Jakarta: Yayasan Kelompok Kerja Visi Anak Bangsa, 2004.

Mulia, Siti Musdah dan Anik Farida, *Perempuan dan Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama kerja sama dengan LKAJ dan The Asia Foundation, 2005.

Nope, C. Y. Marselina, *Jerat Kapitalisme atas Perempuan,* Yogyakarta: Resist Book, 2005.

Ritzer George Kammeyer, Kenneth C.W., dan Norman R. Yetman, *Sociology Experiencing a Change Society*, Massachusetts: Allyn and Bacon, Inc., 1987.

Santoso, Anang, *Bahasa Perempuan: Sebuah Potret Ideologi Perjuangan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

Saptari, R. dan B. Holzner, *Perempuan, Kerja, dan Perubahan Sosial*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997.

Sparingga, Daniel, ”Pemilu 2004: Taksonomi Tema dan Isu Relevan”, dalam *Pemilu 2004 Transisi Demokrasi dan Kekerasan,* Yogyakarta: CSPS Books dan FES Indonesia, 2004.

Soetjipto, Ani Widyani, *Politik Perempuan Bukan Gerhana,* Jakarta: Kompas*,* 2005.

Tong, Ani Rosemarie Putnam, *Feminist Thought, Pengantar Paling Komprehensif Kepada Arus Utama Pemikiran Feminis*, Yogyakarta: Jalasutra, 1998.

Venny, Adriana, ”Pesta Demokrasi: Berkah atau Mimpi Buruk”, dalam *Jurnal Perempuan, No. 34: Politik dan Keterwakilan Perempuan*, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2004.